



Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan Di Kabupaten Gunungkidul

Anjania Rayi Saputri¹⁾, Reza Yustiyanto²⁾

Perwakilan BKKBN DIY, Kota Yogyakarta, Indonesia¹⁾
Pegiat Demokrasi, Sleman, Indonesia²⁾

anjania.rayi@gmail.com¹⁾
rezayustiyanto28@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan kebijakan ini. Menggunakan metode implementasi kebijakan Edward III, penelitian ini menganalisis empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksanaan dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun jumlah sekolah di Gunungkidul cukup banyak akan tetapi implementasi SSK masih terbatas. Faktor penghambat utama meliputi terbatasnya sumber daya, kurangnya komunikasi antar instansi dan keterbatasan pelatihan untuk guru. Selain itu tingginya angka pernikahan dini dan *prevalensi stunting* menjadi masalah sosial yang mendesak untuk ditangani melalui pendidikan kependudukan. Berdasarkan temuan ini peneliti menyarankan agar pemerintah memperkuat implementasi kebijakan SSK dengan meningkatkan anggaran, pelatihan untuk guru dan komunikasi antar lembaga. Peningkatan pemahaman generasi muda mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi dan isu kependudukan merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan sosial di Gunungkidul. Mengingat bonus demografi yang tengah berlangsung, SSK berpotensi menjadi solusi untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, terdidik dan produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi daerah di masa depan.

Kata kunci: Gunungkidul, Implementasi Kebijakan, Sekolah Siaga Kependudukan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) policy in Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta, with a focus on the factors that support and hinder the success of this policy. Using Edward III's policy implementation model, this research analyzes 4 key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The analysis shows that, although the number of schools in Gunungkidul is relatively high, the implementation of SSK is still limited. The main barriers include limited resources, poor communication between institutions, and insufficient teacher training. Additionally, the high rates of child marriage and the prevalence of stunting remain pressing social issues that must be addressed through population education. Based on these findings, the study recommends that local governments strengthen the implementation of the SSK policy by increasing funding, providing better teacher training, and improving inter-agency coordination. Raising awareness among youth regarding family planning, reproductive health, and population issues is crucial to addressing the social problems in Gunungkidul. Given the on going demographic dividend, SSK has the potential to become a solution for creating a healthier, more educated, and productive generation, which can contribute to the region's social and economic development in the future.

Keywords: Gunungkidul, Policy Implementation, Sekolah Siaga Kependudukan

PENDAHULUAN

Menurut laporan dari worldometers.info, pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat yang terbanyak di dunia. Dengan populasi diperkirakan sekitar 285,7 juta jiwa yang menempatkan Indonesia berada di bawah India, China, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang banyak merupakan potensi pembangunan akan tetapi sekaligus menjadi persoalan apabila pemerintah tidak mengelola dengan tepat. Tingginya angka kelahiran dapat memicu tekanan pada sumber daya alam, pelayanan publik, dan infrastruktur yang ada. Selain itu, ketimpangan sosial, masalah kesehatan, pengangguran, hingga *stunting* menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan populasi dapat menjadi potensi, tanpa pengelolaan yang tepat, masalah-masalah ini akan semakin mengancam kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan negara.

Pernikahan dini merupakan salah satu isu kependudukan di Indonesia yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk anak perempuan. Banyak pasangan muda yang terpaksa menikah pada usia yang sangat dini mengakibatkan tingginya angka kehamilan remaja, risiko *stunting*, dan putus sekolah. Hal ini tidak hanya memperburuk kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi keluarga. Untuk itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat kebijakan yang mendukung penurunan angka pernikahan dini guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan terdidik (Putri et al., 2025).

Menurut (Khairunnisa & Nurwati, 2021) pernikahan dini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena mengurangi tingkat pendidikan dan keterampilan generasi muda. Hal ini berisiko menjadikan bonus demografi sebagai beban, bukan peluang, bagi pembangunan nasional. Untuk memastikan bahwa bonus demografi dapat menjadi keuntungan, diperlukan upaya bersama untuk menurunkan angka pernikahan dini melalui edukasi, kebijakan yang mendukung, dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Dalam konteks tersebut pendidikan kependudukan penting untuk membentuk generasi yang berperilaku berencana, memahami kesehatan reproduksi dan mampu mengambil keputusan keluarga secara bertanggung jawab. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah adalah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). SSK adalah model penguatan sekolah yang menggabungkan isu kependudukan, perencanaan berkeluarga, ketahanan keluarga yang digabungkan dalam pembelajaran maupun kegiatan peserta didik. Materi pendidikan kependudukan juga bisa disisipkan dalam berbagai kegiatan kesiswaan seperti ekstrakurikuler, organisasi sekolah dan kegiatan lainnya (Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan, 2019).

Dasar hukum pelaksanaan pendidikan kependudukan ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 12. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pengendalian jumlah penduduk dan program keluarga berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan di daerah harus bekerja sama dalam melaksanakan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal. SSK merupakan salah satu jalur formal yang bisa dijalankan oleh pemerintah karena mempunyai strategi yang efektif untuk mengedukasi remaja atau anak muda tentang isu-isu kependudukan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melaksanakan program SSK sejak tahun 2019 pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Sekolah-sekolah formal yang mengimplementasikan SSK tersebar di lima Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya program SSK, para pelajar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik untuk merencanakan masa depan mereka dengan memperhatikan isu-isu kependudukan (Kusmiati, 2025).

Tabel 1 Capaian Pembentukan SSK Kabupaten/Kota Se DIY

NO	PROVINSI DIY	FORMAL			TOTAL SSK
		SSK TERDAFTAR	SSK DASAR	SSK PARIPURNA	
1	Kabupaten Kulon Progo	14	0	3	17
2	Kabupaten Bantul	24	0	3	27
3	Kabupaten Gunungkidul	6	0	2	8
4	Kabupaten Sleman	24	3	42	69
5	Kota Yogyakarta	22	4	21	47
Total SSK		90	7	71	168

Sumber: simonevpenduk.org, 2025.

Implementasi SSK antar daerah menunjukkan keragaman capaian karena perbedaan dukungan kebijakan, kelembagaan, dan kesiapan satuan pendidikan. Penelitian ini memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi kajian karena berdasarkan tabel 1, wilayah ini tercatat memiliki jumlah SSK paling sedikit, yaitu 8 satuan pendidikan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor implementasi di tingkat daerah maupun satuan pendidikan.

Dari perspektif inovasi kebijakan publik Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kasus yang unik karena memperlihatkan paradoks antara banyaknya permasalahan yang terjadi dan rendahnya penetrasi inovasi kebijakan. Satu sisi Gunungkidul menghadapi persoalan kependudukan yang relatif menonjol dari pada Kabupaten/Kota yang lain di DIY, seperti tingginya angka pernikahan dini, fertilitas remaja, angka *stunting* serta rasio ketergantungan sehingga memberikan tekanan pada kualitas SDM. Besarnya jumlah satuan pendidikan yang ada di Gunungkidul berbanding terbalik dengan jumlah SSK yang sudah ada apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DIY. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Gunungkidul bukan sekedar menjadi lokasi implementasi akan tetapi menjadikan kasus penting bagaimana inovasi kebijakan publik yang diberikan pemerintah walaupun dalam keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan dan sulitnya koordinasi lintas sektor. Dengan demikian penelitian ini relevan untuk menilai sejauh mana SSK sebagai inovasi kebijakan dapat diadaptasi, dilembagakan dan diperluas pada wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi akan tetapi dukungan implementasinya masih sangat rendah.

Kabupaten Gunungkidul menghadapi sejumlah tantangan sosial dan kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Pernikahan dini dan *stunting* menjadi masalah utama yang memperburuk kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan dari gunungkidul.sorot.co kasus pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul ada kecenderungan mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Jumlah kasus mencapai 170 kasus pada tahun 2022 dan jumlah tersebut naik menjadi 185 kasus pada tahun 2023. Data ini diperoleh dari laporan Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul.

Di tengah kondisi tersebut SSK menjadi kebijakan yang sangat relevan dan penting. Tujuan dari program ini adalah untuk memperluas pemahaman dan meningkatkan kesadaran mengenai kependudukan, perencanaan keluarga, dan kesehatan reproduksi di kalangan generasi muda. Pendidikan kependudukan yang diberikan di sekolah dapat menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi pernikahan dini dan masalah kesehatan lainnya, sehingga generasi muda dapat lebih siap untuk membentuk keluarga yang berkualitas.

Penelitian mengenai implementasi SSK telah banyak dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat & Mujadidi, 2023) di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa program SSK berhasil mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam pembelajaran di kelas serta kegiatan ekstrakurikuler, dan berhasil memperkenalkan isu kependudukan kepada para siswa. Hal ini memberikan kesadaran kepada

mereka mengenai pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Selanjutnya (Kusmiati, 2025) dalam penelitiannya tentang implementasi kebijakan SSK di SMA Negeri 1 Banguntapan mengidentifikasi tahapan implementasi yang mencakup interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Faktor pendukung utama yang ditemukan meliputi komunikasi dua arah yang lancar, sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian, dan dukungan fasilitas yang memadai. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran dan hambatan menyisipkan isu kependudukan ke dalam kurikulum sekolah.

Penelitian lain dilakukan (Ulfah, 2021) di MAN Insan Cendekia Tanah Laut mengkaji implementasi pendidikan kependudukan melalui pembelajaran geografi. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah persepsi siswa yang menganggap materi kependudukan terlalu luas dan sulit dipahami. Untuk mengatasi hal tersebut, para guru mengadopsi metode pembelajaran yang lebih menarik, seperti permainan ular tangga, guna meningkatkan minat siswa terhadap materi. Selain itu, penelitian (Kartikasari & Hidayah, 2021) menegaskan bahwa pendidikan kependudukan memiliki peran krusial untuk mencetak generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan kependudukan, seperti pernikahan dini dan pengendalian jumlah penduduk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kependudukan memiliki pengaruh positif dalam membentuk pemahaman remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan pengendalian keluarga.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan keberhasilan SSK, (Abdiyah et al., 2020) dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan SSK di Jawa Timur mengungkapkan bahwa hanya 20,8% sekolah yang berhasil mengimplementasikan program ini secara efektif. Salah satu faktor penghambat utama yang ditemukan adalah keterbatasan dana dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Secara keseluruhan, meskipun SSK menunjukkan hasil positif dalam menyadarkan isu kependudukan, berbagai faktor seperti kendala anggaran, keterbatasan fasilitas, dan kesulitan dalam mengintegrasikan materi kependudukan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program ini di tingkat yang lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi program SSK secara umum namun belum banyak yang mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang lebih spesifik. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki jumlah SSK paling sedikit diantara Kabupaten/Kota lain di DIY, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor implementasi program SSK secara lebih mendalam menggunakan implementasi kebijakan Edward III.

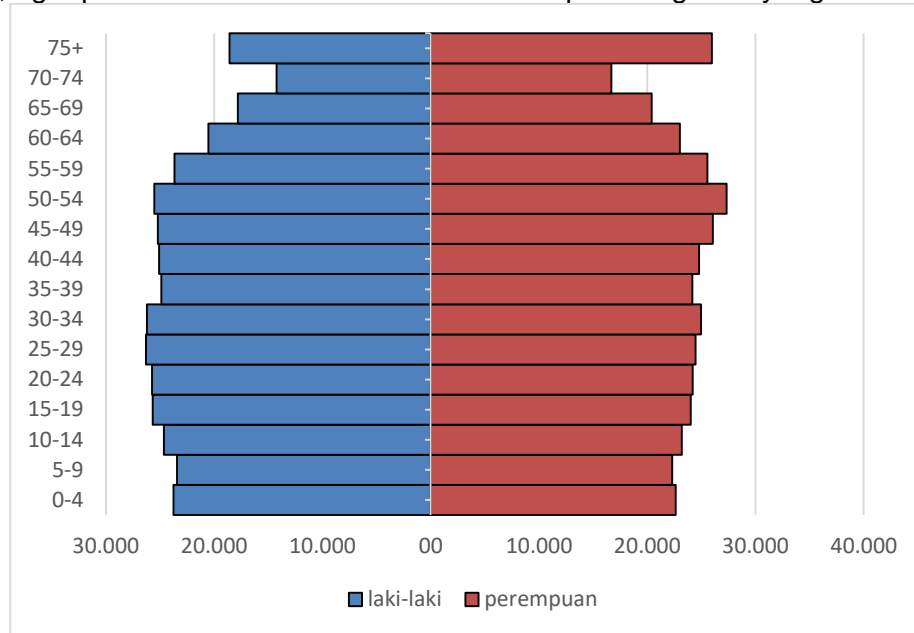
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta menganalisis faktor pendukung yang ada di lapangan. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara langsung dan mendalam terhadap informan yang ada di lapangan yaitu pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan SSK yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, studi kepustakaan sebagai data sekunder digunakan untuk menyaring dan merangkum data yang relevan baik itu buku, jurnal, peraturan perundangan, laporan penelitian, media cetak maupun online. Data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami untuk memudahkan analisis dan pemahaman lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik penduduk Gunungkidul memiliki populasi yang relatif muda dengan lebih banyak perempuan di hampir semua kelompok umur. Perbedaan yang signifikan dari total perempuan dan laki-laki, terutama di kelompok usia lanjut, mencerminkan harapan hidup yang

lebih tinggi pada perempuan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia tua, jumlah penduduk usia muda yang besar menciptakan peluang besar bagi daerah ini untuk memanfaatkan bonus demografi. Namun, penting untuk memastikan bahwa pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja dapat memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang terus berkembang, agar potensi ini bisa dimaksimalkan untuk pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 1 Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Sumber: diolah dari bps.go.id, 2025.

Piramida penduduk yang ditampilkan gambar 1 menggambarkan distribusi penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Berikut adalah interpretasi dari grafik tersebut:

1. **Distribusi Penduduk Usia Muda:**

Kelompok usia 0-4 tahun hingga 10-14 tahun menunjukkan jumlah yang cukup tinggi, dengan lebih banyak laki-laki (dengan batang biru) daripada perempuan (batang merah) di sebagian besar kelompok umur muda. Ini menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki proporsi penduduk usia muda yang besar, yang mencerminkan tingginya angka kelahiran di wilayah ini.

2. **Perbedaan Laki-laki dan Perempuan:**

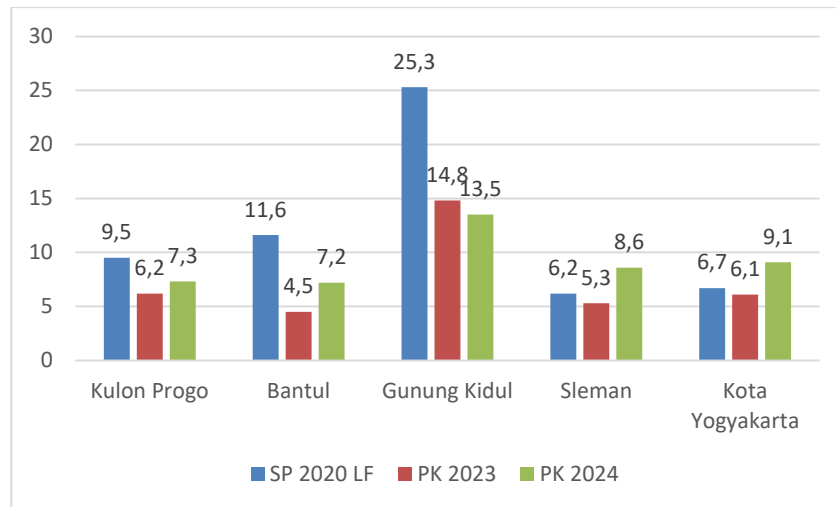
Pada kelompok umur yang lebih lanjut ada gap yang lebih mencolok antara total perempuan dan laki-laki, dengan perempuan cenderung lebih dominan. Hal ini mencerminkan fenomena yang umum ditemukan di banyak populasi, yaitu perempuan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, sehingga jumlah perempuan lebih banyak di kelompok usia lanjut.

3. **Tingkat Kelangsungan Hidup di Usia Tua:**

Pada kelompok umur 75 tahun ke atas, jumlah perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bahwa pada kelompok usia sangat lanjut, angka kematian laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sesuai dengan tren demografis di banyak tempat.

4. **Kepadatan Penduduk Usia Produktif:**

Kelompok umur 25-29 tahun hingga 50-54 tahun menunjukkan angka yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan bahwa penduduk usia produktif di Gunungkidul cukup banyak.

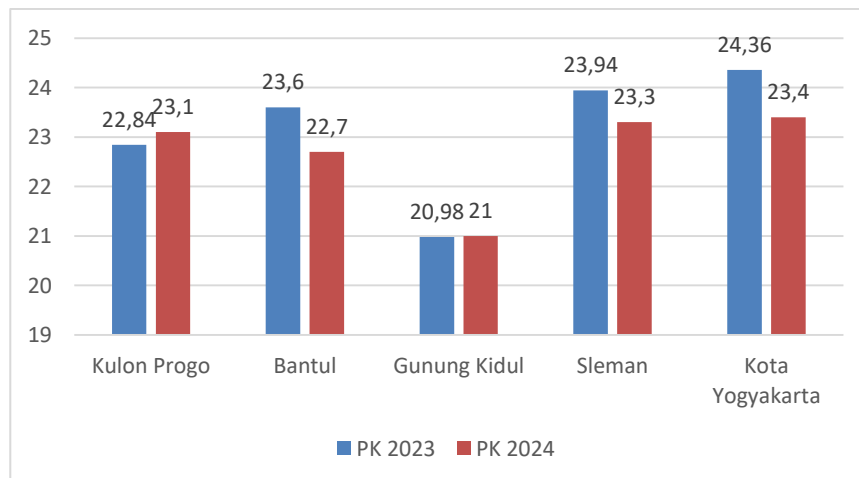


Gambar 2 Grafik perbandingan ASFR 15-19 tahun di Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan SP 2020, PK 2023, dan PK 2024

Sumber: diolah dari siperindu.online, 2025.

Berdasarkan Grafik perbandingan ASFR 15-19 tahun di Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2020, Gunungkidul memiliki angka ASFR yang sangat tinggi, yaitu 25.3 per 1000 wanita usia subur umur 15-19 yang menunjukkan bahwa tingkat kelahiran pada usia tersebut sangat tinggi. Ini mencerminkan bahwa banyak remaja di Gunungkidul yang melahirkan pada usia yang sangat muda, yang bisa menjadi indikasi adanya pernikahan dini atau kurangnya akses kepada pendidikan kependudukan dan layanan kesehatan yang memadai. Namun, data PK 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam angka ASFR, yakni 14.8 pada 2023 dan 13.5 pada 2024.

Penurunan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengendalian kelahiran pada usia remaja di Gunungkidul. Meskipun masih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, penurunan ASFR ini adalah langkah positif menuju kesehatan reproduksi yang lebih baik bagi remaja di Gunungkidul. Penurunan yang terlihat ini sangat penting untuk menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kualitas hidup remaja di Gunungkidul. Keberhasilan kebijakan ini akan memberikan dampak jangka panjang dalam pembangunan sosial-ekonomi di daerah tersebut. Meskipun relatif turun, ASFR 15-19 di Gunungkidul tertinggi di DIY, sehingga kebijakan SSK perlu dilakukan agar tidak terjadi kenaikan angka remaja yang melahirkan di Kabupaten Gunungkidul.

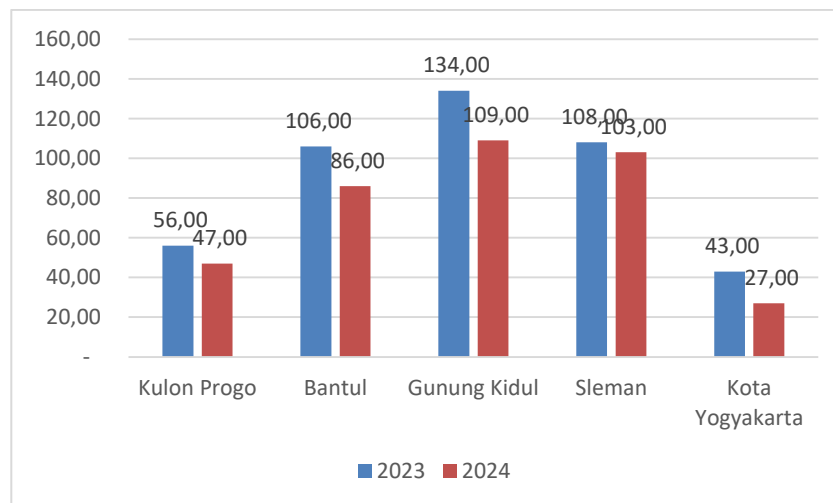


Gambar 3 Grafik perbandingan Median Usia Kawin di Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan PK 2023 dan PK 2024

Sumber: diolah dari siperindu.online, 2025.

Berdasarkan gambar 3, MUKP (Median Usia Kawin Pertama) di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka 20.98 pada tahun 2023, yang berarti usia rata-rata pernikahan pertama di kabupaten ini masih tergolong muda, sekitar 21 tahun. Namun, pada proyeksi 2024, angka MUKP sedikit meningkat menjadi 21, yang mencerminkan adanya pergeseran kecil menuju usia yang lebih matang untuk pernikahan pertama. Meskipun kenaikan ini terbilang kecil, hal ini tetap menunjukkan perkembangan positif, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

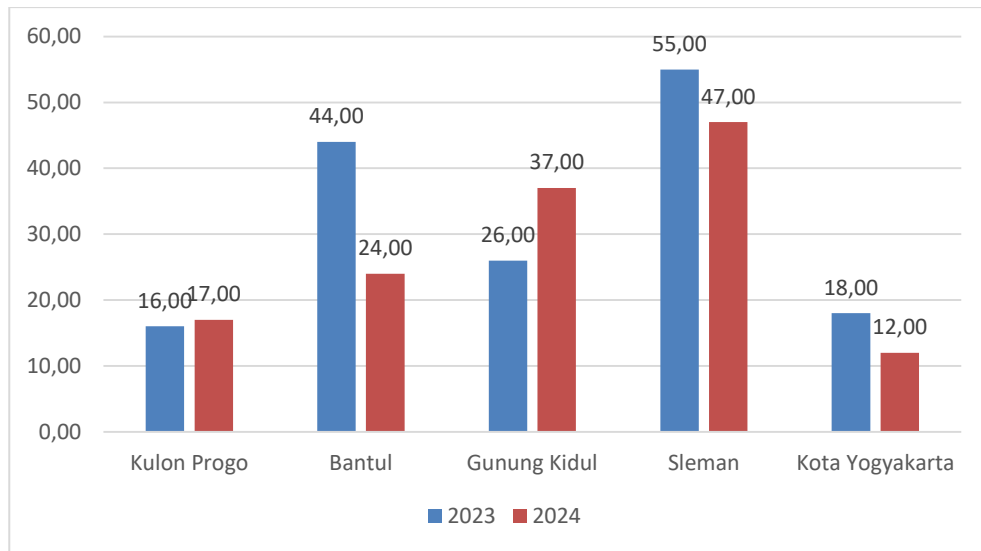
Meskipun ada penurunan angka pernikahan dini, angka MUKP yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kebijakan dan program yang lebih intensif guna menunda pernikahan di usia muda demi meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Melalui SSK, kampanye menikah ideal 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk Perempuan digalakkan, yang harapannya para remaja paham dalam merencanakan pernikahan dan menunda menikah di usia muda.



Gambar 4 Grafik perbandingan pernikahan dini wanita di Kabupaten/Kota di DIY tahun 2023 dan 2024

Sumber: diolah dari bapperida.jogjaprovo.go.id, 2025.

Berdasarkan gambar 4 yang ditampilkan, data mengenai pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2023, tercatat 134, yang merupakan angka tertinggi di antara kabupaten/kota di DIY. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut sedikit menurun menjadi **109**. Meskipun terdapat penurunan, angka ini masih cukup besar dan menunjukkan bahwa pernikahan dini pada wanita di Gunungkidul tetap harus diperhatikan. Penurunan angka pernikahan dini ini dapat diartikan sebagai dampak positif dari berbagai program yang diterapkan. Namun, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka tersebut.

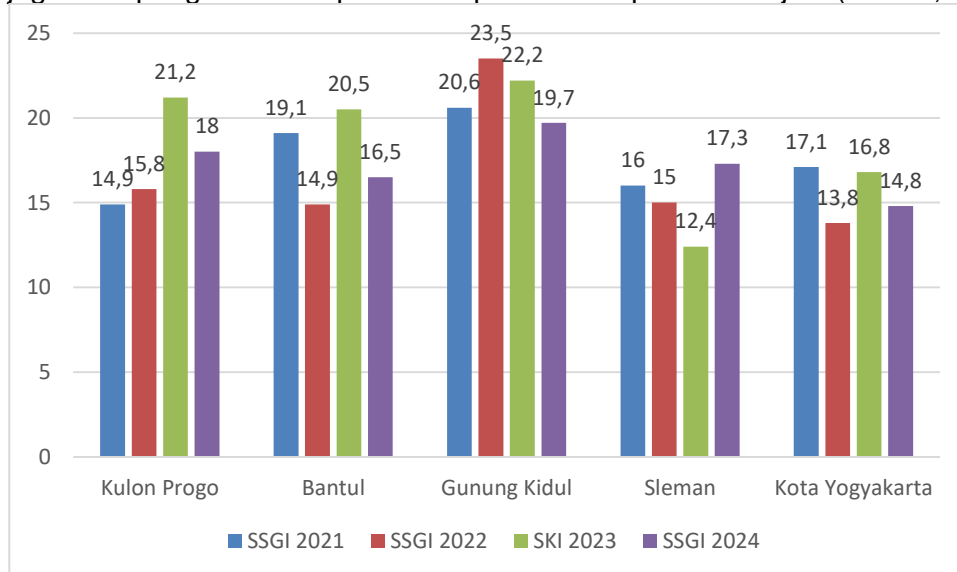


Gambar 5 Grafik perbandingan pernikahan dini laki-laki di Kabupaten/Kota di DIY tahun 2023 dan 2024

Sumber: diolah dari bapperida.jogjaprov.go.id, 2025.

Berdasarkan gambar 5 yang disajikan, data pernikahan dini pada laki-laki di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2023, tercatat 37, namun pada tahun 2024, angka ini naik menjadi 47 yang menjadi salah satu tantangan dalam mengurangi angka pernikahan dini di kalangan laki-laki.

Perkawinan adalah suatu ikatan emosional antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga. Selain kelahiran dan kematian, perkawinan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Umur median pada perkawinan pertama dapat mempengaruhi tingkat fertilitas suatu populasi. Oleh karena itu, penting untuk membedakan umur perkawinan pertama antara pria dan wanita. Selain itu, faktor agama/kepercayaan dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi usia pada saat perkawinan pertama terjadi (Suwito, 2020).



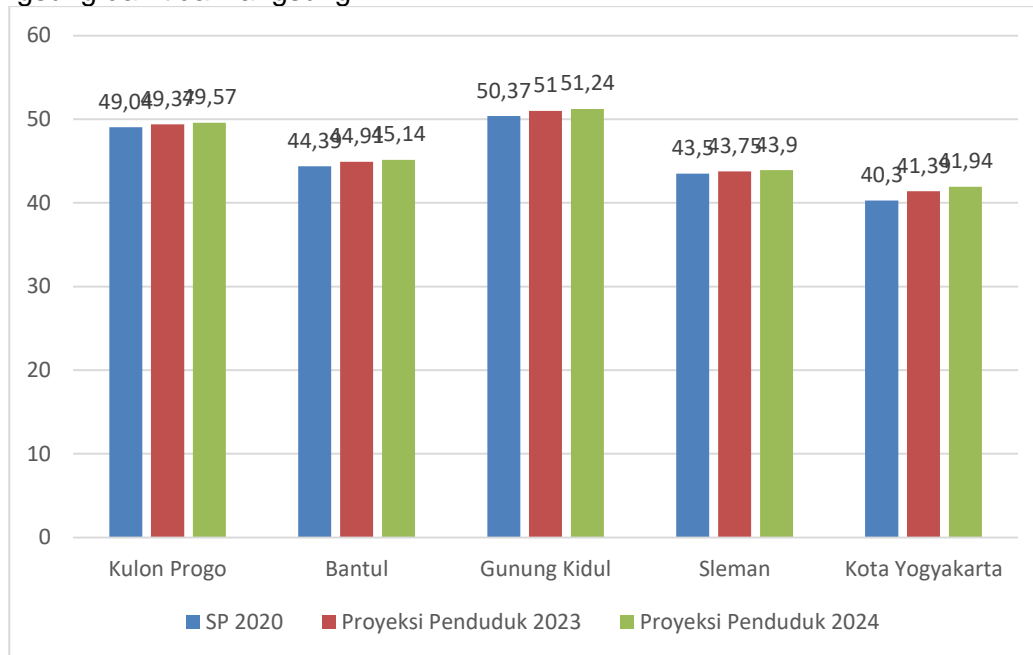
Gambar 6 Grafik perbandingan *prevalensi stunting* di Kabupaten/Kota di DIY tahun 2021-2024
Sumber: diolah dari siperindu.online, 2025.

Data mengenai *prevalensi stunting* di Kabupaten Gunungkidul pada gambar 6 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Gunungkidul tercatat sebesar 23.5, yang merupakan angka tertinggi di antara kabupaten lainnya di DIY. Namun, pada tahun 2022, *prevalensi stunting* sedikit menurun menjadi 22.2, menunjukkan

adanya perbaikan meskipun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2023 dan 2024, yang terlihat pada data SKI 2023 dan SSGI 2024, menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi 19.7 dan 19.7 berturut-turut, yang mencerminkan bahwa upaya untuk mengurangi *stunting* di Gunungkidul mulai menunjukkan hasil yang positif.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY, Gunungkidul mencatatkan angka *prevalensi stunting* yang paling tinggi sehingga masih memerlukan perhatian lebih lanjut dalam upaya penurunan angka *stunting* di masa depan. Sehingga peran SSK sangat diperlukan untuk hal ini dimana sejak remaja siswa/siswi perlu diberikan pengetahuan tentang *stunting*, untuk bekal kehidupannya di masa depan ketika sudah menikah.

Stunting terjadi akibat kekurangan nutrisi yang berlangsung lama, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, yang mengakibatkan anak lebih pendek dari standar tinggi badan untuk usianya dan dapat mengurangi kecerdasan serta kapasitas fisik anak. Dampak jangka panjangnya mencakup penurunan produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan kemiskinan. Selain itu, *stunting* juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kerentanannya terhadap penyakit kronis (Maryuni et al., 2024). Menurut (Samsudin et al., 2023) *stunting* merupakan masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, dan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang dialami oleh ibu hamil atau anak balita. Terdapat faktor langsung dan tidak langsung.



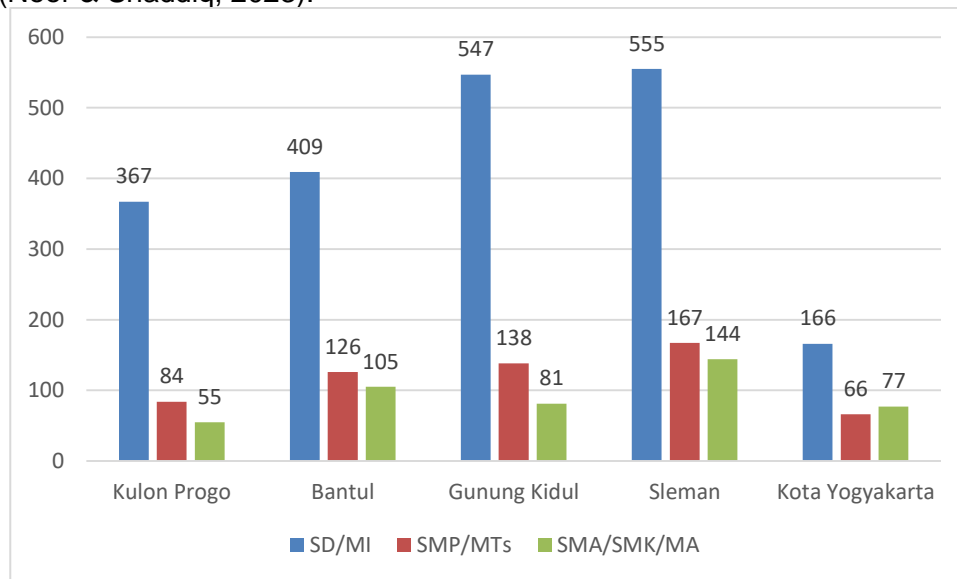
Gambar 7 Grafik perbandingan rasio ketergantungan di Kabupaten/Kota di DIY tahun 2020, 2023, dan 2024

Sumber: diolah dari siperindu.online, 2025.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul menurut gambar 7 menunjukkan angka yang relatif stabil, namun ada sedikit perubahan antara SP 2020 dan proyeksi penduduk 2023 serta 2024. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Gunungkidul tercatat sebesar 50.37, yang berarti ada sekitar 50.37% dari penduduk yang tergolong sebagai penduduk yang bergantung (anak-anak, lansia, dan kelompok non-produktif lainnya) dan perlu didukung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada proyeksi tahun 2023, rasio ini sedikit mengalami kenaikan menjadi 51, menunjukkan bahwa beban ketergantungan di Gunungkidul sedikit meningkat. Pada proyeksi tahun 2024, angka rasio ketergantungan sedikit lebih tinggi lagi, mencapai 51.24, yang menunjukkan bahwa beban penduduk yang bergantung terhadap penduduk usia produktif diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY, Gunungkidul mencatatkan angka rasio ketergantungan lebih tinggi yang menunjukkan pentingnya fokus pada kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas penduduk usia produktif untuk mengurangi beban ketergantungan di masa depan. Program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan peluang ekonomi bagi penduduk usia produktif di Gunungkidul akan sangat diperlukan. Melalui SSK sumber daya manusia dapat dibentuk sejak remaja untuk mencapai pembangunan ekonomi dimasa depan.

Bonus demografi merujuk pada rasio ketergantungan, yang menggambarkan persentase penduduk yang bersifat konsumtif dan bergantung pada kelompok usia 15-64 tahun (usia produktif). Penurunan angka ketergantungan yang terjadi selama transisi demografi akan mencapai titik terendah, kemudian mulai meningkat lagi. Titik terendah ini, yang biasanya berada di bawah 50 persen, dikenal sebagai jendela peluang (*the window of opportunity*). Rasio ketergantungan menggambarkan dampak perubahan struktur usia penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan rasio ketergantungan, kita dapat memahami kelompok mana yang lebih bergantung pada tenaga kerja, apakah anak-anak atau penduduk usia lanjut (Noor & Shaddiq, 2023).



Gambar 8 Grafik perbandingan jumlah sekolah di Kabupaten/Kota di DIY

Sumber: diolah dari yogyakarta.bps.go.id, 2025.

Berdasarkan grafik 8, di Kabupaten Gunungkidul tercatat ada 547 sekolah jenjang SD/MI /sederajat baik negeri maupun swasta, yang merupakan jumlah tertinggi kedua dibandingkan Kabupaten Sleman (555 sekolah). Namun, jumlah sekolah menengah pertama (SMP/MTs/sederajat) baik negeri maupun swasta di Gunungkidul tercatat sebanyak 138 sekolah, yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sleman (167 sekolah) dan Kabupaten Bantul (126 sekolah). Sementara untuk sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA) baik swasta maupun negeri, Gunungkidul hanya memiliki 81 sekolah, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Sleman yang memiliki 144 sekolah, dan Bantul yang memiliki 105 sekolah.

Meskipun jumlah sekolah di Kabupaten Gunungkidul tergolong banyak karena lebih tinggi dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, Jumlah SSK di wilayah ini relatif sedikit. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya pendidikan kependudukan, serta keterbatasan sumber daya untuk mengintegrasikan program SSK ke dalam kurikulum yang sudah ada. Selain itu, mungkin terdapat kekhawatiran mengenai beban tambahan pada jam pelajaran yang sudah padat, atau tantangan dalam menyusun dan mendukung kebijakan tersebut di tingkat sekolah.

Mengingat pentingnya SSK untuk membekali generasi muda dengan pemahaman tentang kependudukan, perencanaan keluarga, dan kesehatan reproduksi, urgensi pembentukan lebih banyak SSK di Kabupaten Gunungkidul menjadi sangat penting. Dengan jumlah sekolah yang banyak, Gunungkidul memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan pendidikan kependudukan. SSK dapat menjadi program yang efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keluarga berkualitas, serta memberikan pengetahuan tentang isu kependudukan. Pembentukan SSK di lebih banyak sekolah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait dengan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan studi dokumentasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan SSK di Kabupaten Gunungkidul, beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan SSK di Gunung Kidul:

1. Pemerintah daerah di Gunungkidul menunjukkan komitmen untuk mendukung program SSK melalui renstra dan rencana kerja. Terdapat keinginan untuk mengintegrasikan SSK ke dalam sistem pendidikan yang ada di Gunungkidul, meskipun ada keterbatasan sumber daya.
2. Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak. Ini memberikan peluang besar untuk memperluas implementasi SSK/pembentukan SSK di lebih banyak sekolah.
3. Di beberapa sekolah seperti SMA Negeri 2 Wonosari, ada kesadaran yang meningkat tentang pentingnya pendidikan kependudukan dan perencanaan keluarga setelah mengikuti kegiatan Akademi Keluarga Indonesia di Jakarta. Sekolah ini juga telah melaksanakan SSK dengan baik dengan meraih prestasi juara regional tahun 2022.
4. Dengan jumlah penduduk usia muda yang besar, Gunungkidul berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan, jika pendidikan kependudukan dapat diterapkan secara lebih luas.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan SSK di Gunungkidul:

1. Anggaran yang terbatas dan keterbatasan SDM yang mampu SSK.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara OPD KB, Dinas Pendidikan, BKKBN, dan sekolah.
3. Kurangnya pelatihan untuk guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pendampingan pengisian SIMONEV.
4. Ketidakjelasan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan peran masing-masing pihak dalam implementasi kebijakan menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik.
5. Beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi SSK mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan kependudukan dan perencanaan keluarga bagi generasi muda, yang menyebabkan kurangnya komitmen dan dukungan dari pelaksana kebijakan.

Hasil temuan studi dokumentasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan kebijakan SSK di Kabupaten Gunungkidul bahwa hambatan dalam implementasi tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi saling berkaitan untuk secara langsung mempengaruhi capaian program. Terdapat tiga hambatan utama dalam implementasi program, pertama keterbatasan anggaran, kedua keterbatasan sumber daya manusia serta yang ketiga tidak jelasnya *standard operating procedure* (SOP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya capaian SSK di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh keterbatasan implementasi kebijakan di Tingkat daerah dan satuan Pendidikan.

Tabel 2 Hambatan Implementasi dan Dampaknya terhadap Target Capaian SSK di Kabupaten Gunungkidul

Hambatan	Masalah di Lapangan	Dampak Langsung pada Implementasi	Dampak pada Target Capaian SSK
Keterbatasan Anggaran	Sosialisasi, pembinaan, pelatihan guru, dan pendampingan sekolah tidak berjalan optimal	Kegiatan penguatan SSK tidak terlaksana secara rutin dan tidak menjangkau banyak sekolah	Penambahan jumlah SSK berjalan lambat dan perluasan program ke lebih banyak sekolah sulit tercapai
Keterbatasan SDM	Pegawai yang khusus mengampu SSK telah purna dan belum ada pengganti sementara beban kerja tersebar di bidang lain	Pendamping teknis, monitoring dan koordinasi menjadi lemah	Sulitnya merintis SSK baru sedangkan sekolah yang sudah ada sulit berkembang ke tahap selanjutnya
Ketidakjelasan SOP	Peran BKKBN, OPD KB, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Sekolah tidak terdefinisi dengan jelas	Pelaksanaan program tidak jelas baik itu alur kerja sampai dengan pelaporan kegiatan	Target tata kelola dan kelembagaan SSK tidak tercapai secara konsisten
Lemahnya koordinasi lintas sektor	Komunikasi antar instansi tidak berjalan dengan baik dan tidak tepat sasaran sosialisasi	Informasi kebijakan tidak tersampaikan secara utuh kepada pelaksana	Perluasan SSK antar jenjang terutama pada sekolah yang belum terjangkau berjalan lambat
Kurangnya pelatihan kepada guru	Guru belum memperoleh orientasi terkait penyusunan RPP yang terintegrasi dan pendampingan SIMONEV	Integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran belum berjalan optimal	Target kualitas implementasi SSK belum tercapai
Rendahnya pemahaman pelaksana	Banyak pihak yang belum memahami urgensi pendidikan kependudukan	Program belum menjadi prioritas pada sekolah maupun instansi terkait	Keberlanjutan dan penguatan kelembagaan SSK masih sangat lemah

Dari tabel diatas selain tiga hambatan utama yang sudah disebutkan terdapat hambatan lain diantaranya lemahnya koordinasi lintas sektor, kurangnya pelatihan kepada guru-guru serta rendahnya pemahaman pelaksana lapangan terhadap program SSK. Dampak dari hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan SSK di sekolah-sekolah tidak seragam dan masih bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah. Hal ini menjelaskan mengapa target mutu implementasi seperti integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran dan penguatan budaya sekolah serta kegiatan lain di sekolah yang berbasis kependudukan belum tercapai secara merata.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah diidentifikasi diatas maka implementasi kebijakan Edward III dapat dianalisis lebih lanjut melalui empat variabel utama sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi antar instansi dan pelaksana kebijakan SSK di Kabupaten Gunungkidul mengalami hambatan yang cukup besar. Salah satunya adalah kesalahan dalam melaksanakan sosialisasi, yang mengundang peserta dari tingkat SMA, padahal SSK jenjang SMP belum terbentuk sama sekali. Hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara OPD KB Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dan BKKBN, yang mengarah pada kesalahan dalam penentuan peserta dan kegiatan. Selain itu, hampir tidak ada komunikasi rutin atau koordinasi lintas sektor, sehingga implementasi SSK terganggu, dan informasi mengenai kebijakan tidak tersampaikan dengan jelas kepada pihak yang seharusnya terlibat.

2. Sumber Daya

Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat implementasi SSK di

Kabupaten Gunungkidul. Meskipun renstra dan rencana kerja telah mencantumkan sosialisasi SSK, anggaran yang terbatas menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu, SDM yang terbatas juga menjadi kendala utama. Pegawai yang sebelumnya mengampu SSK pensiun, dan hingga kini belum ada pengganti, dengan pekerjaan yang terbagi-bagi antara berbagai bidang lainnya. Kekurangan tenaga pengampu ini membuat penerapan kebijakan menjadi kurang maksimal.

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana kebijakan SSK di Kabupaten Gunungkidul juga terpengaruh oleh kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap SSK. Hal ini terlihat dari kurangnya pelatihan untuk guru, seperti di MTS YAPPI MULUSAN, yang belum mengikuti orientasi atau pelatihan penyusunan RPP yang terintegrasi dengan materi Bangga Kencana. Walaupun beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 2 Wonosari, telah aktif melaksanakan SSK, mereka merasa perlu pendampingan lebih intensif, terutama dalam penyusunan RPP dan kegiatan lain terkait pendidikan kependudukan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada niat baik, komitmen dan pemahaman terhadap kebijakan SSK masih perlu ditingkatkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Kabupaten Gunungkidul tidak berjalan dengan efektif. Hal ini tercermin dari ketidakjelasan SOP, kurangnya koordinasi antara OPD KB, BKKBN, dinas pendidikan, Kemenag, dan Penyuluh KB. Keberadaan Pojok Kependudukan dan kegiatan yang dilakukan di beberapa sekolah memang ada, namun tidak terdokumentasi dengan baik dalam laporan aplikasi SIMONEV. Selain itu, struktur birokrasi yang terlalu rumit dan terbatasnya jumlah tenaga dengan beban kerja yang banyak menyebabkan kurangnya pendampingan dan bimbingan yang diperlukan untuk mengimplementasikan SSK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah sekolah di Gunungkidul cukup banyak, implementasi kebijakan SSK masih terbatas. Faktor pendukung seperti jumlah sekolah yang banyak memberikan peluang besar untuk memperluas implementasi SSK. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan pelatihan untuk guru, dan kurangnya komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan yang menghambat implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan data yang telah disajikan, tingginya angka pernikahan dini, *prevalensi stunting*, dan rasio ketergantungan di Gunungkidul menunjukkan bahwa kebijakan SSK sangat diperlukan sebagai strategi pendidikan untuk mengatasi permasalahan sosial. Bonus demografi yang sedang berlangsung di Kabupaten Gunungkidul memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas SDM, membangun generasi muda yang lebih sehat dan terdidik, namun tanpa kebijakan yang tepat seperti SSK, tantangan tersebut akan semakin besar. Oleh karena itu, urgensi pembentukan SSK menjadi semakin penting, karena pendidikan kependudukan dan perencanaan keluarga adalah langkah preventif untuk mengurangi pernikahan dini dan *stunting* di masa depan, demi mencapai Generasi Emas Indonesia pada tahun 2045.

Saran

Dalam konteks keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu mendorong implementasi SSK yang lebih inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen koordinasi, sosialisasi, dan pengendalian program lintas instansi. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat diwujudkan melalui forum koordinasi daring secara berkala antar OPD KB, Dinas Pendidikan, BKKBN, Kementerian Agama, dan sekolah, serta penguatan pelatihan dan pendampingan guru secara hybrid atau daring agar tidak bergantung pada pertemuan tatap muka yang memerlukan biaya besar. Pendekatan ini tidak hanya lebih efisien dalam kondisi fiskal terbatas, tetapi juga dapat mempercepat aliran informasi, memperkuat konsistensi implementasi, dan memperluas jangkauan pembinaan SSK ke sekolah-sekolah yang belum terfasilitasi.



Selain pemanfaatan teknologi, penguatan SSK memerlukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh KB, serta lembaga sosial yang konsen terhadap kependudukan di wilayah lokal. Keterlibatan aktor-aktor tersebut penting untuk memperkuat penerimaan sosial terhadap pendidikan kependudukan serta mendukung penyebaran nilai-nilai perencanaan keluarga, pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kualitas generasi muda. Sehingga implementasi SSK tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang didukung oleh lingkungan masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyah, A., Hartanti, F. I., & Sulistyorini, Y. (2020). Implementation Analysis of Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) in East Java 2019. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 9(2), 137–145. <https://doi.org/10.20473/jbk.v9i2.2020.137-145>
- Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal*.
<https://www.worldometers.info/world-population/>
<https://qunungkidul.sorot.co/berita-109803-link.html>
- Kartikasari, Y., & Hidayah, N. (2021). Implementasi Program Siaga Kependudukan Pada SMAN 1 Ngaglik Sleman. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(1), 174–190. <https://doi.org/doi.org/10.21831/dimensia.v10i2.47322>
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(1), 45–69.
- Kusmiati, D. R. W. (2025). Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 14, 1.
- Maryuni, Handayani, L., & Trustisari, H. (2024). *BUTATING Buku Pintar Cegah Stunting* (W. Arti (ed.)). Penerbit BFS Medika. www.penerbitbfsmedika.com
- Noor, M. S., & Shaddiq, S. (2023). *Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi, Teknologi, dan Kesehatan* (H. Fatimah (ed.)). CV Mine.
- Putri, F., Zahro, F., Ramadhani, H. A., Angelia, J. A., Harahap, J. S., Zali, M., Rafly, M., Lubis, P. F., Ramadani, W. S., & Aulia, R. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan dan Kesejahteraan Remaja. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(1), 365–369.
- Samsudin, Agusanty, S. F., Desmawati, Kurniatin, L. F., Bahriyah, F., Wati, I., Ulva, S. M., Abselian, U. P., Laili, U., Malik, M. N., Purwadi, H. N., & Ernawati, Y. (2023). *Stunting* (Y. Sabilu, L. Rosyanti, & N. I. Nasruddin (eds.)). Eureka Media Aksara.
- Sudrajat, & Mujadidi, S. (2023). Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia)*, 10(02), 100–114. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v10i2.63743>
- Suwito. (2020). *Pengantar Demografi*. Ediide Infografika. www.ediide.com
- Ulfah, R. (2021). Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan Melalui Pembelajaran Geografi di MAN Insan Cendekia Tanah Laut. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2), 91–100. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jgp/index>